

KINERJA KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN TANAH LAUT

*Institutional Performance of Community Forest Farmer Groups
in Tanah Laut Regency*

Boyke Wijaya, Hamdani Fauzi, dan Hafizianor
Jurusan Kehutanan
Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT. *The purpose of this study is to inventory and analyze the institutional performance factors of community forest farmer groups in Tanah Laut district. The expected benefit of this research is to be able to provide data and information on the existing conditions of the KTH HKm institutional performance so that appropriate strategies, facilitation and policies can be carried out to improve and or maintain the institutional performance of the HK KTH. The method used is a 30% random sampling method for 14 populations and a KTH HKm sample. Starting from determining the sample, taking data in the field, processing data and reporting the results of research. The data collected is divided into primary data (farmer group institutional performance data) and secondary data (various literature related to research and physical data such as questionnaires). The results of the study showed that the farmer group Want To Go Forward into the performance class was very good, the Sukamaju farmer group entered the performance class very well, the farmer group Subur Makmur entered the performance class enough and the Harapan Baru farmer group had a good performance class.*

Keyword: *farmer group institutional performance; community forestry*

ABSTRAK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginventarisasi dan menganalisa faktor-faktor kinerja kelembagaan kelompok tani hutan kemasyarakatan di kabupaten Tanah Laut. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan data dan informasi kondisi eksisting kinerja kelembagaan KTH HKm sehingga dapat dilakukan strategi fasilitasi, pendampingan dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan dan atau mempertahankan kinerja kelembagaan KTH HKm. Metode yang digunakan adalah metode random sampling 30% terhadap 14 populasi dan sampel KTH HKm. Dimulai dari menentukan sampel, pengambilan data di lapangan, pengolahan data dan pelaporan hasil penelitian. Data yang dikumpulkan terbagi menjadi data primer (data kinerja kelembagaan kelompok tani) dan data sekunder (berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian dan data fisik seperti kuisioner). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok tani Ingin Maju masuk kelas kinerja sangat bagus, kelompok tani Sukamaju masuk kelas kinerja sangat bagus, kelompok tani Subur Makmur masuk kelas kinerja cukup dan kelompok tani Harapan Baru kelas kinerja bagus.

Kata Kunci: Kinerja kelembagaan kelompok tani; hutan kemasyarakatan

Penulis untuk korespondensi: Surel: boykewj@gmail.com

PENDAHULUAN

Selama dekade 1980-2000an, pengelolaan hutan di luar Jawa diserahkan kepada perusahaan pemegang konsesi HPH. Semenjak saat itu, eksploitasi hutan dilakukan secara besar-besaran tanpa memperhatikan aspek kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat (Fauzi, 2019).

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mendapatkan penetapan areal kerja (PAK) HKm dari Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 8,860 sejak tahun 2016 kepada 77 Kelompok Tani Hutan. Dari ke-77 KTH tersebut, maka sampai 2019 telah mendapat SK Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) sebanyak 14 KTHK (Dishutprov Kalsel, 2019).

Permasalahan yang sering terjadi dalam kelompok tani seperti rendahnya kualitas dalam mengelola usahatani secara efisien

Rendahnya peran dari kelompok tani dalam berbagai program HKm yang dilakukan pemerintah Indonesia disebabkan

masih rendahnya kapasitas kelembagaan kelompok tani itu sendiri (Syahyuti, 2011).

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat perlu melakukan penelitian tentang Kualitas kelembagaan kelompok hutan kemasyarakatan yang telah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Tanah Laut, yang diharapkan nantinya akan menjadi bahan pembelajaran dan pertimbangan untuk kemajuan program hutan kemasyarakatan khususnya Kabupaten Tanah Laut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Kelompok Tani Hutan Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama kurang lebih 4 bulan, termasuk persiapan, pengambilan data dan penyusunan laporan penelitian.

Objek penelitian ini adalah Kelompok Tani Hutan Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) di Kabupaten Tanah Laut sebagai unit populasi

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kuisisioner digunakan untuk wawancara, alat tulis menulis digunakan untuk wawancara, kamera untuk dokumentasi, peta lokasi daerah untuk mengetahui gambaran kondisi daerah penelitian, dan laptop untuk menganalisis data dan menyusun laporan

Populasi dalam penelitian ini adalah Kelompok Tani Hutan Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 14 KTH yang telah mendapat IUPHKm. Penarikan sampel dalam populasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan random sampling dengan intensitas sampling 30%. Berdasarkan data awal yang diperoleh maka sampling penelitian ini sebanyak 4 KTHKm yang akan ditetapkan secara acak sebelum melaksanakan pengumpulan data lapangan. Pengacakan sampling penelitian dilakukan menggunakan sistem undian dimana masing-masing KTHKm mempunyai

kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel penelitian.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian kinerja kelembagaan kelompok tani hutan kemasyarakatan yakni data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data ini dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), Kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara

Data primer diperoleh bersumber dari informan yang merupakan pengurus KTHKm terpilih, pendamping perhutanan sosial di Kabupaten Tanah Laut, penyuluh kehutanan Kabupaten Tanah, dan Staf Bidang PMPPS (Pemberdayaan Masyarakat dan Percepatan Perhutanan Sosial) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

Data sekunder diperoleh melalui pengumpulan informasi yang bersumber dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Kalimantan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, KPH Tanah Laut serta hasil kajian oleh institusi lain dan sebagainya

Kinerja Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan dinilai berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Lomba dan Pemberian Apresiasi Wana Lestari

Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kelembagaan KTHKm dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan hasil wawancara dengan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Kelembagaan KTHHKm

Lembaga kelompok tani yang menjadi unit penelitian ini adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) Ingin Maju Desa Tebing Siring, Kecamatan Bajuin, KTH Suka Maju Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin, KTH Harapan Baru Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang dan KTH Subur

Makmur yang berada di Desa Telaga Kecamatan Pelaihari.

Data bersumber pada informan yang merupakan pengurus di dalam lembaga kelompok tani hutan. Data kinerja terbagi menjadi 3 variabel yaitu administrasi dan kelembagaan yang mempunyai bobot 20%, aktivitas kelompok dengan bobot 60% dan pelaporan mempunyai bobot 20%. Setiap pertanyaan memiliki nilai skor maksimal 3 dan skor minimal 1.

Administrasi dan Kelembagaan

Administrasi dan kelembagaan mempunyai 6 aspek penilaian, terdiri dari

penilaian organisasi dan susunan pengurus, jumlah anggota KTHKm, umur berdirinya kelompok, catatan administrasi kelompok, pengesahan kelompok masyarakat/ tani dan penillaian penetapan IUPHKm. Penilaian administrasi kelembagaan memiliki skor maksimal 18 dan nilai bobot 20 persen.

Organisasi dan Susunan Pengurus

Penilaian organisasi dan susunan pengurus dinilai dari adanya organisasi, susunan pengurus dan pembagian tugas yang jelas. Penilaian aspek organisasi dan susunan pengurus kelembagaan KTHKm terpilih sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Penilaian aspek organisasi dan susunan pengurus kelembagaan KTHKm terpilih

| No | Nama KTHKm | Skor | Keterangan |
|----|--------------|------|---|
| 1. | Ingin Maju | 3 | Ada organisasi, susunan pengurus dan pembagian tugas yang jelas |
| 2. | Sukamaju | 3 | Ada organisasi, susunan pengurus dan pembagian tugas yang jelas |
| 3. | Subur Makmur | 2 | Ada organisasi, dan susunan pengurus |
| 4. | Harapan Baru | 2 | Ada organisasi, dan susunan pengurus |

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa semua KTHKm telah memiliki organisasi dan susunan pengurus. Hal ini memang cukup beralasan karena salah satu persyaratan pengusulan Ijin Usaha Pemanfaatan HKm adalah dengan melampirkan susunan pengurus KTH sesuai dengan Pasal 19 Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 83/2016 yang menyebutkan bahwa permohonan IUPHKm harus diajukan oleh kelompok masyarakat, gabungan kelompok masyarakat, atau koperasi yang dilampirkan susunan pengurus. Menurut Pangarsa (2006), Petani harus berkelompok, mengingat usaha tanipada umumnya dihadapkan pada banyaknyaintervensi dari lingkungannya. Perlu diingat bahwa semua yang mengintervensi usaha tani tersebut pada dasarnya adalah lembaga.

Pembagian tugas yang jelas merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Kelompok Tani Subur Makmur dan Harapan Baru memiliki skor masing-masing 2, karena belum ada pembagian tugas yang jelas. Setiap organisasi atau kelompok yang terbentuk harus memiliki struktur kelompok yang jelas, agar terdapat pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan kegiatannya (Makawekes et al,

2016). Sementara itu menurut Mardikanto (1993), salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dinamika kelompok adalah fungsi tugas, yaitu seperangkat tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota kelompok sesuai dengan kedudukannya dalam struktur kelompok tersebut.

Pembagian tugas mutlak dilakukan dalam organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan. Agar tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan pada satu titik dan kekosongan pada titik yang lain. Setiap organisasi harus diberi beban tugas sesuai latar belakang dan kemampuannya. Tugas dan tanggung jawab seperti dua sisi mata uang yang saling mengkait. Setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap setiap pelaksanaan tugasnya sesuai tupoksi yang dimiliki. Pembagian tugas yang jelas, akan memberikan tanggung jawab pada setiap anggota organisasi, dalam melaksanakan tugas akan terjalin kerjasama, slogan "bersama kita biasa" akan dapat digunakan untuk mengembangkan organisasi kearah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Jumlah Anggota KTHKm

Jumlah anggota kelompok mempengaruhi dalam penilaian, semakin banyak anggota kelompok tani maka

semakin cepat selesai dalam pekerjaan. Penilaian aspek Jumlah anggota KTHKm terpilih sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Penilaian aspek Jumlah Anggota kelembagaan KTHKm terpilih

| No | Nama KTHKm | Skor | Keterangan |
|----|--------------|------|------------|
| 1. | Ingin Maju | 3 | >25 orang |
| 2. | Sukamaju | 3 | >25 orang |
| 3. | Subur Makmur | 2 | 15-25 |
| 4. | Harapan Baru | 2 | 15-25 |

Jumlah anggota kelompok untuk skema Hutan Kemasyarakatan disesuaikan dengan jumlah luasan usulan, dimana masing-masing KK (Kepala Keluarga) dibatasi maksimal 4 ha/KK. Hal ini didasarkan pada rasio kemampuan mengelola lahan per kepala keluarga, asas keadilan, dan pemerataan. Anggota kelompok tani Ingin Maju dan Suka Maju masing-masing mempunyai anggota sebanyak 46 orang dan 27 orang menurut SK yang dikeluarkan, sedangkan Subur makmur mempunyai anggota 24 orang dan Harapan baru 21 orang. Hasil wawancara dilapangan

dikarenakan untuk diwilayah ijin pengelolaan hutan kelompok tani subur makmur dan harapan baru, masyarakat disekitar masih berminat berkerja diluar daerah atau bekerja di perusahaan.

Umur Berdirinya Kelompok

Umur berdiri kelompok tani dinilai dari berdiri dibawah 2 tahun, 2 sampai 4 tahun dan diatas 4 tahun. Aspek umur berdirinya KTHKm terpilih sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Penilaian aspek umur berdirinya kelembagaan KTHKm terpilih

| No | Nama KTHKm | Skor | Keterangan |
|----|--------------|------|------------|
| 1. | Ingin Maju | 3 | >4 tahun |
| 2. | Sukamaju | 3 | >4 tahun |
| 3. | Subur Makmur | 3 | >4 tahun |
| 4. | Harapan Baru | 3 | >4 tahun |

Dari data pada tabel 3 terlihat bahwa seluruh KTHKm terpilih telah dibentuk lebih dari 4 tahun. Menurut Fauzi (2015), jumlah KTHKm di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 77 buah yang tersebar di 34 desa dan dibentuk pada tahun 2011. Saat itu pembentukannya difasilitasi oleh Fakultas Kehutanan Unlam setelah dilakukan sosialisasi hutan kemasyarakatan dan hutan desa di Kabupaten Tanah Laut.

Catatan Administrasi Kelompok

Dalam pengertian sehari-hari, administrasi sering diartikan sebagai segala kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan atau persuratan (Suwandhi, 2007). Dalam penelitian ini, penilaian aspek catatan administrasi dikatakan lengkap apabila memiliki 4 dari 4 unsur catatan administrasi yaitu buku kas, buku daftar anggota, buku tamu dan buku inventaris KTH. Catatan administrasi KTHKm terpilih sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Penilaian aspek catatan administrasi kelompok KTHKm terpilih

| No | Nama KTHKm | Skor | Keterangan |
|----|--------------|------|------------------------------|
| 1. | Ingin Maju | 3 | Lengkap (ada 4 dari 4 unsur) |
| 2. | Sukamaju | 1 | Kurang (ada 2 dari 4 unsur) |
| 3. | Subur Makmur | 1 | Kurang (ada 2 dari 4 unsur) |
| 4. | Harapan Baru | 1 | Kurang (ada 2 dari 4 unsur) |

Kelompok tani Ingin Maju mendapatkan skor 3 karena mempunyai catatan administrasi yang lengkap yaitu yaitu buku tamu, buku notulen rapat, buku daftar anggota dan buku inventaris KTH. Sedangkan Kelompok Tani Suka Maju, Subur Makmur dan Harapan Baru hanya mempunyai buku tamu dan buku daftar anggota.

Untuk bisa menjalankan roda organisasi dengan baik maka catatan administrasi menjadi sangat penting dan mutlak diperlukan karena semua kegiatan kelompok terdokumentasikan dengan baik. Administrasi merupakan suatu fungsi yang tertentu untuk mengendalikan, menggerakkan, mengembangkan, dan

menjalankan suatu organisasi yang dijalankan administrator (Mardikanto, 1993).

Menurut Suwandhi (2007), Fungsi-fungsi administrasi yang harus diperhatikan adalah administrasi personalia, kemudahan dan perlengkapan bagi penyuluhan, administrasi keuangan, pelaporan dan evaluasi serta, dan hubungan dengan lembaga terkait.

Pengesahan Kelompok Masyarakat/Tani

Pengesahan kelompok tani dapat disahkan melalui Bupati/ Walikota atau atas nama Bupati/ Walikota, camat dan kepala desa/ lurah. Penilaian aspek pengesahan kelompok/tani KTHKm terpilih sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Penilaian aspek pengesahan kelompok KTHKm terpilih

| No | Nama KTHKm | Skor | Keterangan |
|----|--------------|------|--------------------|
| 1. | Ingin Maju | 3 | Bupati |
| 2. | Sukamaju | 1 | Kepala desa/ Lurah |
| 3. | Subur Makmur | 1 | Kepala desa/ Lurah |
| 4. | Harapan Baru | 1 | Kepala desa/ Lurah |

Kelompok Tani Ingin Maju mendapatkan pengesahan kelompok melalui Bupati, sedangkan kelompok tani Suka Maju, Subur Makmur dan Harapan Baru, disahkan melalui SK Kepala Desa.

Menurut Permenhut No 57 tahun 2014 bahwa Penetapan KTH dilakukan melalui pemberian sertifikat. Penetapan KTH Kelas Pemula dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah, Kelas Madya oleh Camat dan Kelas Utama oleh Bupati/Wali Kota.

Penetapan IUP-HKm

Mengacu SK Men LHK No 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial bahwa penetapan IUP-HKm diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Semua KTHKm terpilih telah mendapatkan IUPHKm sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.

Semua kelompok tani terpilih sudah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 6. Penilaian aspek penetapan IUP-HKm KTHKm terpilih

| No | Nama KTHKm | Skor | Keterangan |
|----|--------------|------|------------------------------|
| 1. | Ingin Maju | 3 | Telah ditetapkan Menteri LHK |
| 2. | Sukamaju | 3 | Telah ditetapkan Menteri LHK |
| 3. | Subur Makmur | 3 | Telah ditetapkan Menteri LHK |
| 4. | Harapan Baru | 3 | Telah ditetapkan Menteri LHK |

Tabel 7. Penetapan IIUPHKm Terpilih

| No. | Nama KTH | Desa | Kecamatan | Luas | No SK |
|-----|--------------|---------------|---------------|--------|--|
| 1. | Ingin Maju | Tebing Siring | Bajuin | 400 Ha | 2271/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017 (17/4/2017) |
| 2. | Suka Maju | Tebing Siring | Bajuin | 400 Ha | 2271/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017 (17/4/2017) |
| 3. | Harapan Baru | Sungai Pinang | Tambang Ulang | 225 Ha | SK.4901/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2017 |
| 4. | Subur Makmur | Telaga | Pelaihari | 68 Ha | SK.4708/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2017 |

Aktivitas Kelompok

Aktivitas kelompok mempunyai 11 aspek penilaian terdiri dari rencana kerja, partisipasi anggota kelompok, tata batas areal kerja, luas areal yang ditanam dan dipelihara, pemanfaatan areal, jenis tanaman penghasil HHBK, aktivitas kelompok dalam rehabilitasi, aktivitas kelompok dalam bermitra, peningkatan nilai tambah, norma tertulis yang berkaitan dengan kelompok tani dan perlindungan hutan, dan pertemuan rutin dengan pengelola HKm. Penilaian aktivitas

kelompok mempunyai nilai maksimal skor 33 dan bobot nilai 60%.

Rencana Kerja (Rencana umum dan rencana operasional)

Penilaian rencana kerja berupa dokumen yang sudah disahkan oleh pejabat setempat, sudah ada dokumen namun belum disahkan dan belum mempunyai rencana kerja. Penilaian aspek Rencana Kerja KTHKm terpilih sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Aspek penilaian rencana kerja KTHKm terpilih

| No | Nama KTHKm | Skor | Keterangan |
|----|--------------|------|--|
| 1. | Ingin Maju | 3 | Rencana kerja dan telah disahkan pejabat setempat (gubernur/ Bupati) |
| 2. | Sukamaju | 3 | Rencana kerja dan telah disahkan pejabat setempat (gubernur/ Bupati) |
| 3. | Subur Makmur | 3 | Rencana kerja dan telah disahkan pejabat setempat (gubernur/ Bupati) |
| 4. | Harapan Baru | 3 | Rencana kerja dan telah disahkan pejabat setempat (gubernur/ Bupati) |

Semua kelompok tani yang terpilih untuk bahan penelitian mempunyai dokumen rencana kerja dan telah disahkan oleh pejabat setempat (Gubernur/ Bupati) dan mendapatkan nilai skor 3. Ini menandakan bahwa kelompok tani tersebut sudah ada rencana kerja dalam beberapa tahun kedepan.

Partisipasi Anggota

Penilaian aspek partisipasi anggota dinilai apakah anggota dalam kelompok tani sudah paham dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja, anggota sudah paham namun belum melaksanakan kegiatan yang sesuai atau anggota belum memahami bagaimana kegiatan sesuai dengan rencana kerja. Penilaian partisipasi anggota KTHKm terpilih sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Aspek penilaian partisipasi anggota KTHKm terpilih

| No | Nama KTHKm | Skor | Keterangan |
|----|--------------|------|--|
| 1. | Ingin Maju | 3 | Anggota paham dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja. |
| 2. | Sukamaju | 2 | Anggota paham namun belum melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja. |
| 3. | Subur Makmur | 2 | Anggota paham namun belum melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja. |
| 4. | Harapan Baru | 2 | Anggota paham namun belum melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja. |

Dari data yang didapat hanya kelompok tani Ingin Maju yang anggotanya sudah paham dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana. Kelompok tani Sukamaju, Subur Makmur dan Harapan Baru semua

anggota sudah paham dan belum melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja.

Tata Batas Areal Kerja

Tata batas areal kerja dinilai apakah sudah dilakukan penataan batas kerja dan anggota kelompok sudah memahami, sudah melakukan penataan batas namun anggota

belum memahami dan belum dilakukan penataan batas dan anggota belum memahami. Penilaian aspek tata batas areal kerja KTHKm terpilih sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Aspek penilaian tata batas areal kerja KTHKm terpilih

| No | Nama KTHKm | Skor | Keterangan |
|----|--------------|------|---|
| 1. | Ingin Maju | 3 | Telah dilakukan penataan batas dan anggota memahami |
| 2. | Sukamaju | 3 | Telah dilakukan penataan batas dan anggota memahami |
| 3. | Subur Makmur | 1 | Belum dilakukan penataan batas dan anggota belum memahami |
| 4. | Harapan Baru | 1 | Belum dilakukan penataan batas dan anggota belum memahami |

Kelompok tani ingin maju dan suka maju sudah melakukan penataan batas dan semua anggota sudah memahaminya, berbeda dengan kelompok tani subur makmur dan harapan baru yang belum melakukan penataan batas dan anggota belum memahami. Ini dikarenakan kelompok tani subur makmur dan harapan baru belum paham dengan cara penataan batas.

Luas Areal yang Ditanam dan Dipelihara

Luasan areal yang ditanam dan dipelihara dinilai apakah sudah melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan rencana atau belum dilakukan kegiatan. Penilaian aspek luas areal yang ditanam dan dipelihara KTHKm terpilih sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Aspek penilaian luas areal ditanam dan dipelihara KTHKm terpilih

| No | Nama KTHKm | Skor | Keterangan |
|----|--------------|------|--|
| 1. | Ingin Maju | 3 | Penanaman dan pemeliharaan telah sesuai dengan rencana |
| 2. | Sukamaju | 3 | Penanaman dan pemeliharaan telah sesuai dengan rencana |
| 3. | Subur Makmur | 2 | Penanaman dan pemeliharaan belum sesuai dengan rencana |
| 4. | Harapan Baru | 2 | Penanaman dan pemeliharaan belum sesuai dengan rencana |

Kelompok tani ingin maju dan suka maju sudah melakukan kegiatan penanaman dan pemeliharaan sesuai dengan rencana, berbeda dengan kelompok tani subur makmur dan harapan baru yang melakukan kegiatan penanaman dan pemeliharaan belum sesuai dengan rencana.

Pemanfaatan Areal

Pemanfaatan areal dinilai dari segi apakah telah memperoleh manfaat dari HHBK, kurang memperoleh atau belum memperoleh manfaat dari HHBK. Penilaian aspek pemanfaatan areal KTHKm terpilih sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Aspek penilaian pemanfaatan areal KTHKm terpilih

| No | Nama KTHKm | Skor | Keterangan |
|----|--------------|------|-------------------------------|
| 1. | Ingin Maju | 3 | Telah memperoleh manfaat HHBK |
| 2. | Sukamaju | 3 | Telah memperoleh manfaat HHBK |
| 3. | Subur Makmur | 1 | Belum memperoleh manfaat HHBK |
| 4. | Harapan Baru | 1 | Belum memperoleh manfaat HHBK |

Kelompok tani Ingin Maju dan Sukamaju sudah memperoleh manfaat HHBK, adapun manfaat yang diperoleh dari kelompok tani Ingin Maju yaitu dari madu, jamur, karet, jengkol dan sapi. Kelompok tani Sukamaju memperoleh manfaat HHBK dari madu, jengkol, karet dan jamur. Kelompok tani Subur Makmur dan Harapan Baru belum memperoleh manfaat HHBK karena tanaman belum bisa dipanen.

Jenis-jenis Tanaman Penghasil HHBK Utama Pada Lokasi HKm

Jenis tanaman penghasil HHBK dinilai dari berapa banyak tanaman penghasil HHBK yang ditanam oleh kelompok tani. Penilaian aspek jenis-jenis tanaman penghasil HHBK utama pada lokasi HKm KTHKm terpilih sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Aspek penilaian jenis tanaman penghasil HHBK KTHKm terpilih

| No | Nama KTHKm | Skor | Keterangan |
|----|--------------|------|-------------------|
| 1. | Ingin Maju | 3 | 5 jenis tanaman |
| 2. | Sukamaju | 3 | 5 jenis tanaman |
| 3. | Subur Makmur | 2 | 2-5 jenis tanaman |
| 4. | Harapan Baru | 2 | 2-5 jenis tanaman |

Jenis tanaman penghasil HHBK dari kelompok tani Ingin maju terdapat 5 jenis, yaitu kemiri, jambu mente, kayu putih, karet dan jengkol. Kelompok tani Sukamaju mempunyai 5 jenis tanaman yaitu kemiri, jambu mente, kayu putih, karet dan jengkol. Subur makmur ada 3 jenis yaitu karet, cempedak dan kemiri sedangkan Harapan Baru ada 3 jenis yaitu karet, cempedak dan jengkol.

Aktivitas Kelompok Dalam Melakukan Rehabilitasi

Penilaian aktivitas kelompok dalam melakukan rehabilitasi dinilai dari apakah sudah dilakukan penanaman dan membangun bangunan konservasi tanah dan air. Bangunan yang dimaksud berupa menara api, pos pantau dan embung. Aspek penilaian aktivitas kelompok dalam melakukan rehabilitasi KTHKm terpilih sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Aspek penilaian aktivitas kelompok dalam melakukan rehabilitasi KTHKm terpilih

| No | Nama KTHKm | Skor | Keterangan |
|----|--------------|------|--|
| 1. | Ingin Maju | 3 | Vegetatif, bangunan konservasitanah dan air |
| 2. | Sukamaju | 3 | Vegetatif, bangunan konservasi tanah dan air |
| 3. | Subur Makmur | 2 | Vegetatif, tanaman berkayu saja |
| 4. | Harapan Baru | 2 | Vegetatif, tanaman berkayu saja |

Kelompok tani Ingin Maju mendapat skor 3 karena dalam lahan rehabilitasi ada vegetasi tanaman, menara api, embung dan pos pantau. Nilai ini sama dengan kelompok tani Sukamaju karena mempunyai vegetasi tanaman di lahan rehabilitasi, menara api, embung dan pos pantau. Kelompok tani Subur Makmur dan Harapan Baru hanya ada vegetasi tanaman berkayu saja seperti angsana, mahoni dan karet.

Aktivitas Kelompok Dalam Bermitra

Aktivitas kelompok dinilai dari apakah kelompok tani sudah memiliki koperasi dan sudah bermitra, ada koperasi namun belum bermitra atau belum ada koperasi. Aspek Penilaian aktivitas kelompok dalam bermitra KTHKm terpilih sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Aspek penilaian aktivitas kelompok dalam bermitra KTHKm terpilih

| No | Nama KTHKm | Skor | Keterangan |
|----|--------------|------|--------------------------------|
| 1. | Ingin Maju | 3 | Memiliki koperasi dan bermitra |
| 2. | Sukamaju | 3 | Memiliki koperasi dan bermitra |
| 3. | Subur Makmur | 1 | Belum memiliki koperasi |
| 4. | Harapan Baru | 1 | Belum memiliki koperasi |

Kelompok tani Ingin Maju dan Sukamaju sudah memiliki koperasi dan bermitra dengan parapihak, berbeda dengan kelompok tani Subur makmur dan Harapan Baru karena mebangun sebuah koperasi membutuhkan dokumen dan proses yang lama.

Peningkatan Nilai Tambah

Penilaian peningkatan nilai tambah kelompok tani dinilai dari HHBK yang sudah diolah dan dikemas dengan baik atau belum mengolah HHBK. Aspek penilaian Aktivitas peningkatan nilai tambah KTHK_m terpilih sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Aspek penilaian peningkatan nilai tambah KTHK_m terpilih

| No | Nama KTHK _m | Skor | Keterangan |
|----|------------------------|------|---|
| 1. | Ingin Maju | 3 | HHBK telah diolah dan dikemas dengan baik |
| 2. | Sukamaju | 3 | HHBK telah diolah dan dikemas dengan baik |
| 3. | Subur Makmur | 1 | HHBK belum diolah |
| 4. | Harapan Baru | 1 | HHBK belum diolah |

Kelompok tani Ingin Maju dan Suka maju telah mengolah HHBK dan telah dikemas dengan baik. HHBK yang sudah diolah yaitu dari jamur dan madu. Kelmpok tani Subur Makmur dan Harapan Baru belum mengolah dan mengemas HHBK dikarenakan belum dapat dimanfaatkan.

Adanya Norma/ Aturan Tertulis dalam Perlindungan Kawasan.

Aspek penilaian adanya norma/ aturan tertulis yang dimaksud seperti adanya papan peringatan atau tulisan peringatan dikawasan hutan yang dikelola atau aturan-aturan pada kelompok tani. Aspek penilaian adanya norma/ aturan tertulis yang berkaitan dengan kelompok dan perlindungan kawasan KTHK_m terpilih sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 16

Tabel 16. Aspek penilaian norma/ aturan tertulis kelompok dan perlindungan hutan KTHK_m terpilih

| No | Nama KTHK _m | Skor | Keterangan |
|----|------------------------|------|------------|
| 1. | Ingin Maju | 3 | >5 norma |
| 2. | Sukamaju | 3 | >5 norma |
| 3. | Subur Makmur | 2 | 2-5 norma |
| 4. | Harapan Baru | 2 | 2-5 norma |

Kelompok tani Ingin Maju dan Sukamaju mendapatkan nilai skor 3, kelompok tani ini mempunyai papan peringatan/ banner dikawasan hutan yang dikelola seperti papan peringatan/ banner larangan membakar kawasan hutan, melestarikan kawasan hutan, peringatan memasuki kawasan, kesepakatan bersama pengelola HK_m dan norma bekerja kelompok tani dan norma yang lainnya yang berhubungan dengan kelompok atau perlindungan kawasan. Sedangkan kelompok tani Subur Makmur dan Harapan Baru hanya memiliki 3

norma yang berkaitan dengan kelompok dan perlindungan hutan.

Pertemuan Rutin Pengelola HK_m

Aspek pertemuan ini dinilai dari seberapa rutin pertemuan antara kelompok tani dengan pengelola HK_m. Aspek penilaian pertemuan rutin pengelola HK_m KTHK_m terpilih sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Aspek penilaian pertemuan rutin pengelola HKm KTHKm terpilih

| No | Nama KTHKm | Skor | Keterangan |
|----|--------------|------|-----------------------|
| 1. | Ingin Maju | 2 | <1 kali dalam sebulan |
| 2. | Sukamaju | 2 | <1 kali dalam sebulan |
| 3. | Subur Makmur | 2 | <1 kali dalam sebulan |
| 4. | Harapan Baru | 2 | <1 kali dalam sebulan |

Dari data yang diperoleh dilapangan, semua kelompok tani yang terpilih mengadakan pertemuan rutin dengan pengelola HKm hanya 1 kali dalam 1 bulan. Pertemuan ini membahas bagaimana kemajuan kelompok tani yang dibina.

Pelaporan

Pelaporan mempunyai 2 aspek dalam penilaian yaitu penilaian dari penyampaian

laporan dan dokumentasi kegiatan. Seluruh aspek mempunyai skor maksimal 6 dan mempunyai bobot nilai 20 persen.

Penyampaian laporan

Penilaian penyampaian laporan dinilai dari ketepatan waktu dan kelengkapan laporan. Aspek penilaian penyampaian laporan KTHKm terpilih sebagaimana dapat dilihat pada tabel 18.

Tabel 18. Aspek penilaian penyampaian laporan KTHKm terpilih

| No | Nama KTHKm | Skor | Keterangan |
|----|--------------|------|-------------------------------------|
| 1. | Ingin Maju | 3 | Tepat waktu dan lengkap |
| 2. | Sukamaju | 1 | Tidak tepat waktu dan tidak lengkap |
| 3. | Subur Makmur | 1 | Tidak tepat waktu dan tidak lengkap |
| 4. | Harapan Baru | 1 | Tidak tepat waktu dan tidak lengkap |

Kelompok tani Ingin Maju mendapatkan nilai skor 3 karena tepat waktu dan laporan yang lengkap. Kelompok tani Sukamaju, Subur Makmur dan Harapan Baru penyampaian laporan tidak tepat waktu dan tidak lengkap. Jenis laporan yang disampaikan yaitu laporan realisasi RKT KTH yang ditujukan ke BPSKL. Menurut Suwandhi (2007), Salah satu kendala yang sering dijumpai dalam

administrasi penyuluhan adalah lemahnya sistem pelaporan dan evaluasi.

Dokumentasi Kegiatan

Penilaian dokumentasi kegiatan dinilai dari ada dokumen foto dari penataan areal kerja sampai dengan kegiatan penanaman. Aspek penilaian dokumentasi kegiatan KTHKm terpilih sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Aspek penilaian dokumentasi kegiatan KTHKm terpilih

| No | Nama KTHKm | Skor | Keterangan |
|----|--------------|------|---|
| 1. | Ingin Maju | 3 | Ada dokumen foto mulai PAK s.d kegiatan penanaman |
| 2. | Sukamaju | 3 | Ada dokumen foto mulai PAK s.d kegiatan penanaman |
| 3. | Subur Makmur | 3 | Ada dokumen foto mulai PAKs.dkegiatan penanaman |
| 4. | Harapan Baru | 3 | Ada dokumen foto mulai PAK s.d kegiatan penanaman |

Dilihat dari Tabel 19, seluruh kelompok tani yang terpilih mendapatkan nilai skor yang sama yaitu 3. Semua kelompok tani memiliki dokumen foto dari penataan areal kerja, foto pengolahan lahan, foto penanaman dan foto pemeliharaan tanaman

Skor yang sudah dihitung dan diperoleh kelompok tani dimasukkan ke skor interval dan skor ini yang menentukan kelas kinerja

kelompok tani. Kelas kinerja dengan kategori sangat bagus memiliki skor interval 80 sampai 100, kategori kelas kinerja bagus dengan skor interval 60 sampai 80, kategori kelas kinerja cukup memiliki skor interval 40 sampai 60 sedangkan kategori kelas kinerja kurang memiliki skor interval 0 sampai 40. Untuk hasil kategori kelas kinerja dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Kategori Kelas Kinerja KTH HKm terpilih

| No | Nama KTHK _m | Skor Diperoleh | Skor Interval | Kelas Kinerja |
|----|------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1. | Ingin Maju | 96,36 | >80-100 | Sangat Bagus |
| 2. | Suka Maju | 85,25 | >80-100 | Sangat Bagus |
| 3. | Subur Makmur | 58,98 | >40-60 | Cukup |
| 4. | Harapan Baru | 61,21 | >60-80 | Bagus |

Kelompok Tani Ingin Maju masuk kedalam kelas kinerja sangat bagus karena memperoleh nilai skor 96,36. Kelompok tani Sukamaju masuk kelas kinerja sangat bagus dengan skor perolehan 85, 25. Untuk kelompok tani Subur makmur mendapat skor perolehan paling rendah yaitu 58, 98 dan masuk kategori kelas cukup dan kelompok tani Harapan baru mendapatkan perolehan skor 61,21 dan masuk kelas kinerja bagus.

Faktor yang mempengaruhi Kelembagaan KTHHK_m

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Faktor yang mempengaruhi kinerja kelembagaan kelompok tani adalah pendampingan yang intensif, bantuan sarana prasarana, dan kualitas sumberdaya manusia.

Seluruh KTHK_m terpilih mempunyai modal awal yang sama, yaitu sama-sama belum mengetahui tentang apa itu HK_m, bagaimana melaksanakan, apa saja yang bisa dilakukan, hak dan kewajiban seperti apa?. Setelah adanya sosialisasi dan fasilitasi baru lah mereka mulai mengetahui dan memahaminya sehingga terdorong untuk mengusulkan program HK_m. Setelah mendapat SK IUPHK_m maka kegiatan pasca izin, tidak semua KTHK_m mendapatkan pendampingan dan fasilitas dari penyuluh kehutanan, dan pendamping Perhutanan Sosial.

Berbeda dengan HK_m Desa Tebing Siring (KTHK_m Ingin Maju dan Suka Maju), mereka mendapat pendampingan yang

intensif, kontinyu, dan terprogram. Pendampingan tidak hanya dari penyuluh dan pendamping PS, tapi juga dari akademisi Fakultas Kehutanan ULM. Bahkan manakala dijumpai permasalahan yang bersifat teknis di luar ilmu kehutanan, maka didatangkan lah narasumber dari berbagai pihak, misalnya dari PT Bridgestone untuk teknis budidaya dan panen karet, dari Dinas Peternakan untuk pengembangan Ternak Sapi, dan dari Dinas Koperasi untuk teknis pembentukan dan manajemen koperasi.

Intensitas penyuluhan yang jarang dilaksanakan dari penyuluh, skedul waktu penyuluhan yang tidak terjadwal dan penyuluh yang tidak berada/ berdiam di wilayah kelompok tani membuat informasi yang berhubungan dengan kinerja kelompok tani menjadi lambat. Ini berpengaruh untuk peningkatan kinerja kelembagaan,

Bantuan-bantuan yang ditujukan ke kelompok tani seperti bantuan bibit, bantuan dana yang terlambat menghambat untuk meningkatkan kinerja kelompok tani. Hal ini disebabkan karena usul bantuan sarana prasarana ke BPSKL Kalimantan sangat banyak dan cakupannya regional Kalimantan, sehingga pihak BPSKL terpaksa harus melakukan seleksi bantuan sarpras.

Untuk itu, pihak KTH perlu melakukan pendekatan ke berbagai pihak misalnya Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan SKPD lain untuk memasukkan proposal bantuan sarpras dan kegiatan.

Kurangnya kordinasi antar anggota kelompok tani dalam bekerja di lapangan dan kurangnya anggota dalam satu kelompok tani, hal ini memperlambat kemajuan kinerja kelompok tani tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kinerja Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (KTHKm) terpilih tergolong kategori cukup sampai sangat bagus. KTHKm Subur Makmur memiliki skor 58,98 (cukup), Harapan Baru memiliki skor 61,21 (bagus), Suka Maju mempunyai skor 85,25 (sangat bagus), dan Ingin Maju dengan skor 96,36 (sangat bagus).

Faktor yang memengaruhi kinerja kelembagaan yaitu ada tidaknya pendampingan yang intensif termasuk informasi dan penyuluhan, bantuan kelompok tani dan SDM kelompok tani.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka bagi KTHKm yang tergolong masih cukup dan bagus perlu meningkatkan kinerjanya, dan sudah sangat bagus harus tetap melakukan inovasi dan pengembangan diri.

Untuk meningkatkan kinerja harus ada pendampingan yang intensif dari parapihak, baik pemerintah, akademisi, dan swasta. KTHKm juga harus memperluas jaringan kerjasama dengan banyak pihak sehingga tidak tergantung kepada BPSKL Kalimantan ataupun instansi kehutanan. KTHKm juga harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM.

DAFTAR PUSTAKA

Adhawati.S.S. 1997. *Analisis Ekonomi Pemanfaatan Lahan Pertanian Dataran Tinggidi Desa Parigi (Hulu DAS Malino)* Kabupaten Goa. Thesis Program Pasca Sarjana Universitas Hasanudin. Makasar

Ali S. 2007. *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur Dalam Penelitian*. Bandung : CV Pustaka setia

Anantanyu. (2009). *Partisipasi petani dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani*. (Disertai). Bogor: Sekolah Pascasarjana Insitut Pertanian Bogor

Arikunto S, 2009. *Dasar –Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara

Eka Nur Kamilah (2014) Pengaruh Keterampilan Mengajar Guru Terhadap Hasil belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Akuntansi. Skripsi. Bandung: UPI

Fauzi, H. 2012. *Pembangunan Hutan Berbasis Kehutanan Sosial*. CV. Karya Putra Darwati. Bandung.

Gawi, J. (1999). *Konsep pengembangan Hutan Kemasyarakatan*. Makalah disajikan dalam Seminar dan Lokal karya Pengembangan SDM Hutan Kemasyarakatan. 7–9 April 1999. Bogor : ICRAF

Ginoga, K.,Lugina, M., Djaenudin, D., Parlinah, N. 2004. *Kajian Kebijakan Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB) Kehutanan di Indonesia*. Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan. Vol. 1, Agustus Th. 2004. Bogor. Indonesia

Hermanto, & Swastika, D. K. S. (2011). Penguatan kelompok tani: langkah awal peningkatan kesehatan petani. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 9 (4), 371 - 390.

Indriantoro, Nur Dan Supormo, 2002, *Metologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi Dan Manajemen,Edisi Pertama*, Yogyakarta:BPFE

Kuswatoro, D. P. et al (2014). *Kajian lanskap agroforestry pada DAS priotas (DAS Cikawang)*. Ciamis : Balai Penelitian Teknologi A groforestri

Lestari, G.I (2012). *Dinamika kelompok tani hutan rakyat di Desa Lemahduhur*, (Tesis), Bogor: Sekolah pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Levis , L, R. 2013. *Komunikasi Penyuluhan Pedesaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Lumis, C.P. 1964. Social systems. Essay on their persistence and change.

Van Nostrand Company, London. p. 369.

- Mantra, IB. 2000. *Demografi Umum. Pustaka Pelajar*. Yogyakarta.
- Mun'im, A.(2012). Analisis faktor ketersediaan, akses dan penyerapan pangan di kabupaten surplus pangan: Pendekatan *Partial Least Square Path Modelling*. *Jurnal Agroekonomi*, 30 (1), 41 -56.
- North DC. 1990. *Institutions, Institutional Change & Economic Performance*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Nurdin, Ali, 2006, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Faza Media
- Ostrom, E. 1985. *Formulating the elements of institutional analysis*. Paper presented to Conference on Institutional Analysis & Development. Washington D.C. May 21-22.
- Pangarsa, A., 2006. Memperkuat Kelompok Tani Sebagai Media Belajar Unit Produksi dan Lembaga Ekonomi. Pusdiklat IPB. Bogor.
- Pasaribu., 2007. *Pengantar Sosial Pedesaan dan Pertanian*. Gajah Mada University Press
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Kemen LHK. 2016
- Puspitodjati, T., Junaidi., Rahmat, I. S., Kuswantoro, D.P., Handayani, W., & Indrajaya, Y. (2013). *Kajian lanskap agroforestry pada DAS priotas (DAS Cimuntur)*. Ciamis : Balai Penelitian Teknologi Agroforestry
- Pranadji, T. 2003. *Penajaman Analisis Kelembagaan Dalam Perspektif Penelitian Sosiologi Pertanian dan Pedesaan*. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 21(1):12-25. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor
- Ruhimit, I. S. (2015). Tingkat motivasi petani dalam penerapan sistem agroforestry. *Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan*, 12 (2): 131 -147.
- Ruttan, V. W & Hayami, Y. 1984. *Toward a theory of induced institutional innovation*. *Jurnal of Development Studies*. (20): 203-33.
- Soekanto, Edi., 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi terbaru. Jakarta: Raja Grafindo
- Soemardjan, S & dan Soleman, S., 1974 *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI
- Soemarno, 2006. Kaidah Analisis Kesesuaian Lahan.
- Sumarlan, Sumardjo, Prabowo, T., & Darwis, S. (2012). Peningkatan kinerja petani sekitar hutan dalam penerapan sistem agroforestry di pegunungan Kendeng Pati. *Jurnal Agroekonomi*, 30 (1), 25-39.
- Suprayitno, A. (2011). *Model peningkatan partisipasi petani sekitar hutan dalam mengelola hutan kemiri rakyat: Kasus pengelolaan hutan kemiri kawasan pegunungan Bulusaraung Kabupaten Maros Sulawesi Selatan*. (Disertai). Bogor: Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Syahyuti. (2011). *Gampang-gampang susah mengorganisasikan petani*. Bogor: IPB Press
- Wiyoni, G (2011). *Merancang penelitian bisnis dengan SPSS dan Smart PLS2.0*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN